

Penilaian Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Pasca Gempa Lombok)

Rusli Amrul¹, Rusdi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the valuation of fixed assets damaged by the earthquake in the Government Office of Population and Civil Registry Departement of North Lombok Regency. Data analysis used in this research is descriptive analysis method by collecting data, grouped and then arranged so that can be investigated based on relevant theories relating to the problem discussed by describing the situation or a phenomenon in the form of quantitative and qualitative data. The results of this study are fixed assets removed from the balance sheet by calculating the valuation of equipment assets that are eliminated in the financial statements in the balance sheet as of December 31, 2018 ie equipment is credited so that it automatically removes equipment assets in the balance sheet. Accumulated Depreciation and Deficit for equipment removal is recorded in the Operational Report (LO) as of December 31, 2018 and is an operating expense and reduces operating income. The valuation of office building assets that are eliminated from the financial statements in the balance sheet as of December 31, 2018, namely Office Buildings is credited so that it automatically deletes the Office Building Assets in the balance sheet. Accumulated Depreciation and Deficit for write-off of office buildings are recorded in the Operational Report (LO) as of December 31, 2018 and become an operating expense to reduce operating income.

Keywords: *fixed assets, PSAP 07*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian aset tetap yang rusak akibat bencana gempa bumi pada Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berbentuk data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah aset tetap dihapus dari neraca dengan cara penghitungan penilaian aset peralatan yang dieliminasi pada laporan keuangan didalam neraca per 31 Desember 2018 yakni peralatan dikredit sehingga secara otomatis menghapus Aset peralatan yang ada di neraca. Akumulasi Depresiasi dan Defisit penghapusan peralatan dicatat dalam Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018 dan menjadi beban operasional serta mengurangi pendapatan operasional. Penilaian aset bangunan kantor yang dieliminasi pada pelaporan keuangan didalam neraca per 31 Desember 2018 yakni Bangunan Kantor dikredit sehingga secara otomatis menghapus Aset Bangunan Kantor yang ada di neraca.

¹ Penulis Koresponden. rusliamr@gmail.com

Akumulasi Depresiasi dan Defisit penghapusan bangunan kantor dicatat dalam Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018 dan menjadi beban operasional mengurangi pendapatan operasional.

Kata Kunci: aset tetap, PSAP 07

PENDAHULUAN

Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan dimana saja tanpa mengenal waktu. Indonesia khususnya provinsi NTB lebih khususnya pulau Lombok dilanda gempa Bumi Tektonik sebanyak 3 kali berkekuatan besar. Pertama pada tanggal 29 Juli 2018 dengan kekuatan magnitude 6,4 kemudian disusul gempa yang lebih besar lagi pada tanggal 5 Agustus 2018 dengan kekuatan gempa magnitude 7,0 yang meluluh lantahkan rumah khususnya di Lombok Utara kemudian pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan kekuatan gempa magnitude 6,9, belum lagi gempa-gempa susulan sampai dengan 21 Agustus Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 1.005 gempa susulan yang terjadi di Lombok (nasional.kompas.com 218/08/21). Menurut Gubernur NTB di sekitar Lombok Utara itu 70 persen bangunan rusak," (6/8/2018). <https://nasional.kompas.com>. Kabag Umum Setda Kabupaten Lombok Utara 90 persen bangunan instansi pemerintahan setempat rusak berat. Bahkan gempa menghancurkan Kantor Bupati hingga Gedung DPRD KLU. <http://www.suarantb.com>. Beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Utara rusak berat, salah satunya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) yang merupakan kantor pelayanan sangat vital, karena merupakan pelayanan publik kependudukan yang hampir tidak ada liburnya. Kantor DUKCAPIL hampir 80% mengalami kerusakan akibat gempa. Sementara pelayanan darurat di tempat parkir yang masih utuh dan tidak beresiko ambruk meskipun masih diberlakukan darurat bencana. Bagian kap bangunan dan beberapa aset tetap semuanya rusak. Untungnya data yang ada masih utuh setelah di lakukan instalasi ulang(<https://globallombok.com>)

Kerusakan aset tetap daerah seperti pada kantor DUKCAPIL Kabupaten Lombok Utara memerlukan penilaian karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Aset daerah merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset daerah ini dapat berupa aset keuangan dan non keuangan. Aset non keuangan ini merupakan aset tetap yang dimiliki oleh daerah.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi sebagai acuan dan dasar. Salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 169) disebutkan bahwa aset tetap dalam pemerintahan adalah "Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum." Indra Bastian (2002 : 69) menyebutkan pengertian tentang aset tetap "Adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun". Zaky Baridwan (2004:271) mengemukakan bahwa "aset tetap adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal Definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa Aset tetap adalah suatu harta atau sumber daya yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, digunakan dalam kegiatan (operasi) perusahaan dan tidak dimaksud untuk diperjualbelikan perusahaan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap diklasifikasikan seperti "tanah,

peralatan dan mesin, gedung, bangunan jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam bangunan”.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 (2010) menyatakan bahwa tujuan PSAP 07 adalah “mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap”

PSAP 07 adalah pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”. Suatu aset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum.

Indra Bastian (2002) menyatakan bahwa “Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan yang merupakan cerminan nilai pasar”. Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN masukan dan setiap biaya yang dapat diatribusi secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) menyatakan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan”.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”. Apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibangun secara swakelola (2010 : 173) maka dinyatakan “biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut”. Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) disebutkan bahwa “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas’.

Fungsi pelaporan keuangan efektif maka semua informasi yang relevan harus disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Mengenai pengungkapan aset tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) menyatakan dalam menyatakan bahwa “Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan,

pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada dan mutasi aset tetap lainnya. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa referensi di atas kerusakan aset tetap pada kantor DUKCAPIL Kabupaten Lombok Utara akibat gempa bumi diperlukan penilaian kembali sehingga aset daerah secara Akuntansi Pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penilaian aset tetap yang rusak akibat bencana gempa bumi pada Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) di Kabupaten

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian terapan. Menurut Sugiono, penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis.

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang berasal dari wawancara dengan informan kunci yaitu PPK OPD, Bidang Aset dan Kasi Akuntansi. Sedangkan Data sekunder meliputi gambaran umum Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Daftar inventaris aset OPD Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) di Kabupaten Lombok Utara dan Struktur Organisasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, teknik wawancara, yaitu dilakukan kepada informan kunci (PPK SKPD, Bidang Aset, dan Kasi Akuntansi). Kedua, teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang dimiliki pihak-pihak yang bersangkutan sehubungan dengan aset tetap khususnya data aset yang rusak akibat gempa.

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan Analisis Deskriptif dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga tidak perlu merumuskan hipotesis. Metode Analisis Deskriptif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berbentuk data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis data aset Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), mengacu pada data yang ada atau data yang diberikan oleh Dinas DUKCAPIL. Dalam analisis data ini akan menilai aset tetap yang sudah rusak berat dan hilang sehingga aset tersebut dalam laporan keuangan atau Neraca terhapus sebagai aset tetap.

Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Sebelum dilakukan jurnal penghapusan aset tetap peralatan dan mesin, maka penyusutan aset salah satu bagian yang sangat penting harus dilakukan. Dalam melakukan penghitungan penyusutan maka aset yang sudah di inventaris perlu dilakukan pengelompokan aset agar diketahui persentase penyusutan dari masing-masing aset tersebut. Berikut adalah pengelompokan aset tetap. Golongan I bukan bangunan, Kelompok 1 (aset tetap yang memiliki manfaat 4 tahun) seperti peralatan kantor. Penyusutan menggunakan garis lurus sebesar 25 %. Kelompok 2 (aset tetap yang memiliki masa manfaat 8 tahun) seperti kendaraan dan mesin. Penyusutan menggunakan garis lurus sebesar 12.5 %. Kelompok 3 (aset tetap yang memiliki masa manfaat 16 tahun), Jalan, irigasi dan jaringan. Penyusutan menggunakan garis lurus sebesar 6.25 %. Golongan II Bangunan Permanen (bangunan yang memiliki usia ekonomis 20 Tahun). Penyusutan menggunakan garis lurus sebesar 5 %

Data aset Peralatan dan Mesin Dinas DUKCAPIL Kabupaten Lombok Utara, aset peralatan dan mesin sejumlah 121 tersebut masuk dalam kategori Kelompok 1 yakni aset tetap peralatan yang memiliki manfaat 4 tahun dan penyusutan menggunakan garis lurus sebesar 25 %. Penghitungan penyusutan periode terakhir yakni per 31 Desember 2018, dikarenakan proses terjadi gempa bulan Juli 2018 sehingga proses penghimpunan data aset yang rusak dan hilang dilakukan sampai dengan akhir tahun 2018. Untuk memudahkan menentukan penyusutan aset tersebut maka perlu disusun tahun penyusutan terakhir berdasarkan tahun pengadaan.

Berdasarkan pada data dan analisa data diatas penilaian aset tetap pada OPD Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pasca Gempa Lombok, data aset baik peralatan maupun bangunan kantor mengalami rusak berat (sudah tidak layak digunakan lagi) dan hilang. Pengelompokan data yang dilakukan berdasarkan pertahun, aset peralatan kantor dengan pengadaan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 sudah habis masa penyusutan, tetapi aset tersebut masih tercatat pada Inventaris di kantor OPD Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. Sebagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 menyatakan bahwa aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut pengadaan aset dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 seharusnya aset tersebut sudah dieliminasi dari Neraca.

Berikut adalah rincian penghitungan tahun penyusutan terakhir aset peralatan Dinas DUKCAPIL dan penyusutan terakhir per 31 Desember 2018 berdasarkan urutan tahun sebagai berikut:

Tabel 1. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2009

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
1	Brand Kas	2009	5,000,000	4 Tahun	2012	5,000,000	-
2	Fillling Kayu	2009	3,750,000	4 Tahun	2012	3,750,000	-
3	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2009	4,545,000	4 Tahun	2012	4,545,000	-
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2009	1,800,000	4 Tahun	2012	1,800,000	-
5	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2009	1,600,000	4 Tahun	2012	1,600,000	-
Total			16,695,000	Total		16,695,000	

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data di atas maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2009 pada bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Akumulasi Depresiasi Peralatan Rp. 16,695,000

Peralatan

Rp. 16,695,000

Tabel 2. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2010

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
6	Perkakas Standar Lain-lain	2010		4 Tahun	2013		-
7	Gergaji	2010		4 Tahun	2013		-
8	Palu	2010		4 Tahun	2013		-
9	Pacul	2010		4 Tahun	2013		-
10	Linggis	2010		4 Tahun	2013		-
11	Garpu Besi	2010		4 Tahun	2013		-

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
12	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2010		4 Tahun	2013		-
13	Rak-rak penyimpanan	2010		4 Tahun	2013		-
14	Tombak	2010		4 Tahun	2013		-
15	Tombak	2010		4 Tahun	2013		-
16	Arit	2010		4 Tahun	2013		-
17	Mesin Ketik Manual Standar	2010	7,200,000	4 Tahun	2013	7,200,000	-
18	Meja Biro	2010	4,625,000	4 Tahun	2013	4,625,000	-
19	Kipas Angin	2010	1,920,000	4 Tahun	2013	1,920,000	-
20	Wireless	2010	5,000,000	4 Tahun	2013	5,000,000	-
21	Printer	2010	8,250,000	4 Tahun	2013	8,250,000	-
22	UPS	2010	27,560,000	4 Tahun	2013	27,560,000	-
23	Proyektor + Attachment	2010	21,750,000	4 Tahun	2013	21,750,000	-
24	Handy Cam	2010	7,500,000	4 Tahun	2013	7,500,000	-
25	Kursi Tamu	2010	7,000,000	4 Tahun	2013	7,000,000	-
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2010	2,000,000	4 Tahun	2013	2,000,000	-
27	Meja Biro	2010	925,000	4 Tahun	2013	925,000	-
Total			93,730,000		Total	93,730,000	

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data di atas maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2010 pada bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Depresiasi Peralatan Rp. 93,730,000

Peralatan

Rp. 93,730,000

Tabel 3. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2011

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
28	AC Split	2011	8,000,000	4 Tahun	2014	8,000,000	-
29	Lap Top	2011	23,200,000	4 Tahun	2014	23,200,000	-
30	Lap Top	2011	5,200,000	4 Tahun	2014	5,200,000	-
31	Lap Top	2011	8,000,000	4 Tahun	2014	8,000,000	-
32	Alat Pemeliharaan Tanaman	2011	17,820,000	4 Tahun	2014	17,820,000	-
33	Lemari kayu	2011	4,500,000	4 Tahun	2014	4,500,000	-
34	UPS	2011	974,000	4 Tahun	2014	974,000	-
35	Modem	2011	650,000	4 Tahun	2014	650,000	-
Total			68,344,000		Total	68,344,000	

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data di atas maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2011 pada bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Depresiasi Peralatan Rp. 68,344,000

Peralatan

Rp. 68,344,000

Tabel 4. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2012

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
36	Genset	2012	71,225,000	4 Tahun	2015	71,225,000	-
37	Televisi	2012	5,000,000	4 Tahun	2015	5,000,000	-
38	Personal Komputer						
	Lain-lain	2012	5,000,000	4 Tahun	2015	5,000,000	-
39	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	2012	5,183,750	4 Tahun	2015	5,183,750	-
40	AC Unit	2012	4,998,400	4 Tahun	2015	4,998,400	-
41	Meja Kerja	2012	11,880,000	4 Tahun	2015	11,880,000	-
42	Meja Kerja	2012	4,488,000	4 Tahun	2015	4,488,000	-
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2012	3,960,000	4 Tahun	2015	3,960,000	-
44	Telephone (PABX)	2012	1,500,000	4 Tahun	2015	1,500,000	-
45	White Board	2012	3,000,000	4 Tahun	2015	3,000,000	-
46	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2012	5,000,000	4 Tahun	2015	5,000,000	-
47	Kursi Rapat	2012	3,000,000	4 Tahun	2015	3,000,000	-
48	Kipas Angin	2012	630,000	4 Tahun	2015	630,000	-
49	Loudspeaker	2012	600,000	4 Tahun	2015	600,000	-
50	Tangga Aluminium	2012	1,000,000	4 Tahun	2015	1,000,000	-
51	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	12,340,000	4 Tahun	2015	12,340,000	-
52	Printer	2012	827,000	4 Tahun	2015	827,000	-
53	Stabilizer/Stavolt	2012	13,600,000	4 Tahun	2015	13,600,000	-
54	Telephone (PABX)	2012	1,500,000	4 Tahun	2015	1,500,000	-
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2012	7,920,000	4 Tahun	2015	7,920,000	-
56	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	2012	5,981,250	4 Tahun	2015	5,981,250	-
57	AC Unit	2012	7,500,000	4 Tahun	2015	7,500,000	-
58	Mesin Ketik Manual Standar	2012	3,000,000	4 Tahun	2015	3,000,000	-
		Total	179,133,400		Total	179,133,400	

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data di atas maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2012 pada bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Depresiasi Peralatan Rp. 179,133,400

Peralatan

Rp. 179,133,400

Tabel 5. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2013

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
59	Mesin Potong Rumput	2013	5,890,000	4 Tahun	2016	5,890,000	-
60	P.C Unit/ Komputer PC	2013	13,000,000	4 Tahun	2016	13,000,000	-
61	White Board	2013	3,000,000	4 Tahun	2016	3,000,000	-
62	Sofa	2013	10,000,000	4 Tahun	2016	10,000,000	-
63	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2013	9,000,000	4 Tahun	2016	9,000,000	-

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
64	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2013	15,000,000	4 Tahun	2016	15,000,000	-
65	Printer	2013	3,400,000	4 Tahun	2016	3,400,000	-
66	Printer	2013	1,150,000	4 Tahun	2016	1,150,000	-
67	Meja Reseption	2013	10,000,000	4 Tahun	2016	10,000,000	-
68	AC Split	2013	34,200,000	4 Tahun	2016	34,200,000	-
Total			104,640,000		Total	104,640,000	

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data di atas maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2013 pada bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Depresiasi Peralatan Rp. 104,640,000

Peralatan

Rp. 104,640,000

Tabel 6. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2014

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
69	P.C Unit/ Komputer PC	2014	8,000,000	4 Tahun	2017	8,000,000	-
70	Kursi Putar	2014	6,000,000	4 Tahun	2017	6,000,000	-
71	Televisi	2014	6,000,000	4 Tahun	2017	6,000,000	-
72	Printer	2014	2,500,000	4 Tahun	2017	2,500,000	-
73	Printer	2014	8,500,000	4 Tahun	2017	8,500,000	-
74	Printer	2014	850,000	4 Tahun	2017	850,000	-
75	Papan Panel	2014	2,000,000	4 Tahun	2017	2,000,000	-
76	AC Unit	2014	20,000,000	4 Tahun	2017	20,000,000	-
77	Printer	2014	1,250,000	4 Tahun	2017	1,250,000	-
78	Printer	2014	1,888,889	4 Tahun	2017	1,888,889	-
79	Printer	2014	850,000	4 Tahun	2017	850,000	-
80	Lemari Besi	2014	4,000,000	4 Tahun	2017	4,000,000	-
Total			61,838,889		Total	61,838,889	

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data di atas maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2014 pada bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Depresiasi Peralatan Rp. 61,838,889

Peralatan

Rp. 61,838,889

Tabel 7. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2015

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
81	Hard Disk	2015	465,000	4 Tahun	2018	465,000	-
82	Printer	2015	1,400,000	4 Tahun	2018	1,400,000	-

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
83	Printer	2015	2,000,000	4 Tahun	2018	2,000,000	-
84	Printer	2015	10,000,000	4 Tahun	2018	10,000,000	-
85	Printer	2015	9,900,000	4 Tahun	2018	9,900,000	-
86	UPS	2015	3,000,000	4 Tahun	2018	3,000,000	-
87	UPS	2015	1,000,000	4 Tahun	2018	1,000,000	-
Total			27,765,000		Total	27,765,000	

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data diatas maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2015 pada bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Akumulasi Depresiasi Peralatan Rp. 27,765,000

Peralatan

Rp. 27,765,000

Tabel 8. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2016

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
88	Mini Komputer	2016	2,500,000	4 Tahun	2019	1,875,000	625,000
89	Modem	2016	2,300,000	4 Tahun	2019	1,725,000	575,000
90	Camera Digital	2016	16,500,000	4 Tahun	2019	12,375,000	4,125,000
91	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	2016	3,000,000	4 Tahun	2019	2,250,000	750,000
92	Kipas Angin	2016	2,500,000	4 Tahun	2019	1,875,000	625,000
93	Loudspeaker	2016	2,000,000	4 Tahun	2019	1,500,000	500,000
94	Kursi Rapat	2016	5,500,000	4 Tahun	2019	4,125,000	1,375,000
95	Line Printer	2016	3,000,000	4 Tahun	2019	2,250,000	750,000
96	Printer	2016	10,000,000	4 Tahun	2019	7,500,000	2,500,000
97	Printer	2016	12,000,000	4 Tahun	2019	9,000,000	3,000,000
98	Printer	2016	2,500,000	4 Tahun	2019	1,875,000	625,000
99	P.C Unit/ Komputer PC	2016	5,848,533	4 Tahun	2019	4,386,400	1,462,133
100	P.C Unit/ Komputer PC	2016	10,927,500	4 Tahun	2019	8,195,625	2,731,875
101	P.C Unit/ Komputer PC	2016	21,188,000	4 Tahun	2019	15,891,000	5,297,000
102	Kursi Rapat	2016	4,000,000	4 Tahun	2019	3,000,000	1,000,000
103	Printer	2016	2,500,000	4 Tahun	2019	1,875,000	625,000
104	Printer	2016	1,250,000	4 Tahun	2019	937,500	312,500
Total			107,514,033		Total	80,635,525	26,878,508

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data diatas untuk tahun 2016 tahun penyusutan berakhir pada tahun 2019 sehingga pada Bulan Desember 2018, masih ada sisa nilai buku, maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2016 pada bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Depresiasi Peralatan Rp. 80,635,525

Defisit Penghapusan Peralatan Rp. 26,878,508

Peralatan

Rp. 107,514,033

Tabel 9. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2017

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
105	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2017	29,700,000	4 Tahun	2020	14,850,000	14,850,000
106	AC Unit	2017	10,000,000	4 Tahun	2020	5,000,000	5,000,000
107	Printer	2017	10,133,333	4 Tahun	2020	5,066,667	5,066,667
108	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2017	2,750,000	4 Tahun	2020	1,375,000	1,375,000
109	Harddisk Eksternal	2017	1,000,000	4 Tahun	2020	500,000	500,000
110	Harddisk Eksternal	2017	5,280,000	4 Tahun	2020	2,640,000	2,640,000
111	Lap Top	2017	15,000,000	4 Tahun	2020	7,500,000	7,500,000
112	Harddisk Eksternal	2017	2,500,000	4 Tahun	2020	1,250,000	1,250,000
113	Memory	2017	899,250	4 Tahun	2020	449,625	449,625
114	CCTV	2017	33,000,000	4 Tahun	2020	16,500,000	16,500,000
115	Printer	2017	1,266,667	4 Tahun	2020	633,333	633,334
Total			111,529,250		Total	55,764,625	55,764,625

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data diatas untuk tahun 2017 tahun penyusutan berakhir pada tahun 2020 sehingga pada Bulan Desember 2018 masih ada sisa nilai buku, maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2017 pada bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Depresiasi Peralatan Rp. 55,764,625

Defisit Penghapusan Peralatan Rp. 55,764,625

Peralatan

Rp. 111,529,250

Tabel 10. Penyusutan Pengadaan Barang Tahun 2018

NO URUT	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	HARGA PEROLEHAN	MASA MANFAAT	TAHUN PENYUSUTAN TERAKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER TAHUN 2018	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2018
116	Jam elektronik	2018	6,250,000	4 Tahun	2021	1,562,500	4,687,500
117	Camera digital	2018	8,000,000	4 Tahun	2021	2,000,000	6,000,000
118	Televisi(satu set parabola)	2018	7,000,000	4 Tahun	2021	1,750,000	5,250,000
119	laptop	2018	19,500,000	4 Tahun	2021	4,875,000	14,625,000
120	Printer	2018	10,500,000	4 Tahun	2021	2,625,000	7,875,000
121	Printer	2018	9,000,000	4 Tahun	2021	2,250,000	6,750,000
Total			60,250,000		Total	15,062,500	45,187,500

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data di atas untuk tahun 2018 tahun penyusutan berakhir pada tahun 2021 sehingga pada Bulan Desember 2018, masih ada sisa nilai buku, maka jurnal untuk penghapusan aset peralatan tahun 2018 pada bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Akumulasi Depresiasi Peralatan Rp. 15,062,500

Defisit Penghapusan Peralatan Rp. 45,187,500

Peralatan

Rp. 60,250,000

Pembahasan dalam penelitian ini bersifat kasuistik, penilaian aset pada kantor OPD Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dilakukan secara menyeluruh terhadap aset yang rusak dan hilang pasca gempa berdasarkan data. Sesuai dengan PSAP 07

secara ekonomis aset peralatan dan bangunan setelah pasca gempa sudah tidak layak dan hilang maka harus dieliminasi dari Neraca. Dari hasil analisis data bahwa jumlah aset peralatan yang harus dieliminasi dari Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Penyusutan Peralatan Kantor Tahun 2009 s/d 2018

Tahun Pengadaan	Aset	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2018	Nilai Buku Per 31 Desember 2018
2009	Peralatan Kantor	Rp. 16,695,000	-
2010	Peralatan Kantor	Rp. 93,730,000	-
2011	Peralatan Kantor	Rp. 68,344,000	-
2012	Peralatan Kantor	Rp. 179,133,400	-
2013	Peralatan Kantor	Rp. 104,640,000	-
2014	Peralatan Kantor	Rp. 61,838,889	-
2015	Peralatan Kantor	Rp. 27,765,000	-
2016	Peralatan Kantor	Rp. 80,635,525	Rp. 26,878,508
2017	Peralatan Kantor	Rp. 55,764,625	Rp. 55,764,625
2018	Peralatan Kantor	Rp. 15,062,500	Rp. 45,187,500
Total		Rp. 703,608,939	Rp. 127,830,633

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data diatas maka untuk menghapus atau mengeliminasi aset peralatan dari Neraca per 31 Desember 2018 adalah akumulasi depresiasi penyusutan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 703,608,939 dan defisit penghapusan aset peralatan sebesar Rp. 127,830,633, jika di buat jurnal secara keseluruhan sebagai berikut:

Akumulasi Depresiasi Peralatan	Rp. 703,608,939	
Defisit Penghapusan Peralatan	Rp. 127,830,633	
Peralatan		Rp. 831,439,572

Dalam hal pelaporan keuangan pemerintah didalam neraca per 31 Desember 2018 peralatan yang dikredit sebesar Rp. 831,439,572 secara otomatis menghapus Aset peralatan yang ada di debit sehingga aset peralatan menjadi nol. Akumulasi Depresiasi sebesar Rp. 703,608,939 dan Defisit penghapusan peralatan sebesar Rp. 127,830,633 dicatat dalam Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018 dan menjadi beban operasional mengurangi pendapatan operasional. Aset bangunan kantor yang akan dieliminasi dari Neraca per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Penyusutan Bangunan Kantor Tahun 2016 s/d 2017

Tahun Pengadaan	Aset	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2018	Nilai Buku Per 31 Desember 2018
2016	Bangunan Kantor	Rp. 172,591,800	Rp. 1,553,326,200
2017	Bangunan Kantor	Rp. 46,125,000	Rp. 261,375,000
Total		Rp. 203,341,800	Rp. 1,830,076,200

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data diatas maka untuk menghapus atau mengeliminasi aset Bangunan Kantor dari Neraca per 31 Desember 2018 adalah akumulasi depresiasi penyusutan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 203,341,800 dan defisit penghapusan aset peralatan sebesar Rp. 1,830,076,200, jika di buat jurnal sebagai berikut :

Akumulasi Depresiasi Bangunan Kantor	Rp. 203,341,800	
Defisit Penghapusan Bangunan Kantor	Rp. 1,830,076,200	
Bangunan Kantor		Rp. 2,033,418,000

Dalam hal pelaporan keuangan pemerintah didalam neraca per 31 Desember 2018 Bangunan Kantor yang dikredit sebesar Rp. 2,033,418,000 secara otomatis menghapus Aset Bangunan Kantor yang ada di debit sehingga aset Bangunan Kantor menjadi nol. Akumulasi Depresiasi sebesar Rp. 203,341,800 dan Defisit penghapusan bangunan kantor sebesar Rp. 1,830,076,200 dicatat dalam Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018 dan menjadi beban operasi anl mengurangi pendapatan operasional.

Penghapusan barang milik pemerintah tidak sembarang untuk menghapus sebuah aset. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan pasal I angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasandan pengendalian. Berdasarkan peraturan menteri tersebut penghapusan sebagai tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan atau kuasa pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data terhadap penilaian aset OPD Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pasca gempa Lombok, penilaian aset dilakukan secara menyeluruh terhadap aset yang rusak dan hilang pasca gempa berdasarkan data. Sesuai dengan PSAP 07 secara ekonomis aset peralatan dan bangunan setelah pasca gempa sudah tidak layak dan hilang maka harus dieliminasi dari Neraca. Penilaian aset peralatan yang dilaporkan pada laporan keuangan didalam neraca per 31 Desember 2018 yakni peralatan dikredit sebesar Rp. 831,439,572 secara otomatis menghapus Aset peralatan yang ada di debit sehingga aset peralatan menjadi nol. Akumulasi Depresiasi sebesar Rp. 703,608,939 dan Defisit penghapusan peralatan sebesar Rp. 127,830,633 dicatat dalam Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018 dan menjadi beban operasi anl mengurangi pendapatan operasional. Penilaian aset bangunan kantor pada pelaporan keuangan didalam neraca per 31 Desember 2018 adalah Bangunan Kantor dikredit sebesar Rp. 2,033,418,000 secara otomatis menghapus Aset Bangunan Kantor yang ada di debit sehingga aset Bangunan Kantor menjadi nol. Akumulasi Depresiasi sebesar Rp. 203,341,800 dan Defisit penghapusan bangunan kantor sebesar Rp. 1,830,076,200 dicatat dalam Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018 dan menjadi beban operasi anl mengurangi pendapatan operasional. Keputusan penghapusan aset dari laporan keuangan harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan pemerintah melalui peraturan menteri.

Dalam melakukan inventaris data aset, khususnya pada bagian aset di OPD Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara harus diperhatikan berakhirnya penyusutan masing-masing aset dan pengelompokan jenis aset. Peraturan tentang ketentuan penilaian aset harus di perhatikan terutama ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penilaian aset menjadi sangat penting apalagi jika terjadi bencana seperti Gempa Lombok yang memporak porandakan bangunan di kabupaten Lombok Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua.
- Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Baridwan, Zaky, 2004. *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta : Penerbit BPFE

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3, Jakarta: Penerbit Erlangga. Jakarta, Salemba Emp.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/17222191> (Diakses tanggal 8 Oktober 2018)
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/17222191/wapres-kalla-dapat-laporan-70-persen-bangunan-di-lombok-utara-rusak>. (Diakses tanggal 8 Oktober 2018)
- <http://www.suarantb.com/news/2018/08/16/260035/Bupati.Yakin,Lombok.Utara.akan.Bangkit> (Diakses tanggal 8 Oktober 2018)
- <https://globallombok.com/2018/08/10/kantor-dukcapil-klu-rusak-80-pasca-gempa> (Diakses tanggal 8 Oktober 2018)
- Kicknewstoday.com. <https://kicknews.today/2019/05/02/rp-188-miliar-aset-lombok-utara-diusulkan-dihapus> (Diakses tanggal 19 Juli 2019)
- Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. 2010. *Akuntansi Aset Tetap*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara